

MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS ETNOSAINS UNTUK PEWARISAN BUDAYA BERKELANJUTAN

Muhammad Mahfud

Institut Al Azhar Menganti Gresik
Mahfudmuhammad90@gmail.com

Rahmat Rudianto

Institut Al Azhar Menganti Gresik
rudiantorahmat1987@gmail.com

Abstract: *This research aims to find an ethnoscience-based curriculum management model for sustainable cultural inheritance. This research is included in the descriptive research category with a qualitative approach. Data collection methods were carried out by means of Focus Group Discussions, in-depth interviews and also documentation. The research results show that ethnoscience-based curriculum management is structured through four stages, namely planning, organizing, actuating, and controlling. In implementing an ethnoscience-based curriculum, you must pay attention to the principles of integration, relevance, efficiency, effectiveness and flexibility. The learning process in an ethnoscience-based curriculum uses a contextual approach by presenting learning content in a context that is relevant to students based on their cultural and social realities. The form of learning is active learning. The forms of strategy that can be used by educators are group discussions, project based learning (PjBL), problem based learning (PBL), discovery learning, inquiry learning, and presentations to build in-depth understanding. Apart from that, cultural reflection can also be done to build students' critical reasoning.*

Keywords: *Curriculum Management, Ethnoscience, Cultural Heritage.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari banyaknya jumlah suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat 3000 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan beragam budaya dan tradisi yang melekat di dalamnya¹. Ragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia harus tetap dijaga dan dilestarikan agar eksistensi dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya tidak luntur.

¹ E Boulding, *Building a Global Civic Culture: Education for an interdependence world* (Syracuse University Press, 1990).



Nilai yang terkandung dalam sebuah budaya dapat dijadikan pijakan dalam berperilaku oleh para pemilik budaya tersebut². Tak terkecuali Indonesia yang menjadikan nilai budaya sebagai filter dalam bertindak dan berperilaku khususnya dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0. sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa globalisasi selain berdampak positif juga membawa dampak negatif yang salah satunya berupa distorsi pola pikir dan perilaku yang berimbas kepada berubahnya perilaku dari akar budaya yang membentuknya³.

Globalisasi dengan kemajuan teknologinya telah mengaburkan batas-batas suatu negara tak terkecuali percampuran budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya tersebut⁴. Pergulatan antara nilai-nilai budaya global dengan nilai-nilai budaya lokal memungkinkan terwujudnya dampak pada termarginalkannya nilai-nilai budaya lokal Indonesia oleh budaya global. Hal tersebut dapat terjadi apabila Indonesia tidak memiliki pewarisan budaya yang kondusif dalam tatanan hidup masyarakat Indonesia yang luas dan beragam. Oleh karena itu Indonesia harus selalu menjaga kelestarian budaya dan memupuk budaya yang kondusif untuk maju. Harrison menyebutkan bahwa kesuksesan suatu negara sangat bergantung pada sejauh mana suatu negara memiliki budaya yang kondusif untuk terus maju dan berkembang.⁵

Bangsa yang menjadi pemenang dalam pergulatan globalisasi adalah bangsa yang memiliki perilaku yang penuh dengan kekhasan, seperti perilaku hemat, berjiwa pekerja keras, memiliki loyalitas yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Fukuyama⁶ yang menjelaskan bahwa beberapa negara maju contohnya Jepang dan Jerman telah menekankan budaya kondusif kepada para warganya dengan ciri kapitalisme komunitarian (*communitarian capitalism*) yang dianggap lebih unggul dibanding sistem Kapitalisme individualistis (*individualistic capitalism*) yang diterapkan oleh Amerika dan Inggris. Nilai-nilai budaya yang dianut dan diterapkan oleh Jepang dan Jerman dalam studi di atas sejatinya telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Namun karena derasnya arus globalisasi yang berdampak pada hilangnya budaya asli Indonesia dan lunturnya nilai-nilai luhur dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia⁷.

Untuk mengatasi keberlanjutan pengikisan budaya luhur Indonesia tersebut maka perlu adanya sistem pewarisan budaya berkelanjutan dengan cara melakukan sosialisasi pewarisan budaya⁸. Langkah pewarisan budaya berkelanjutan ini juga pernah disuarakan oleh Menteri Kebudayaan dalam ajang G20 yang mana beliau menyebutkan bahwa budaya dan kebudayaan Indonesia sangat berperan dalam percaturan global dan bahkan dapat

² Gary Yuki, *Leadership in Organization* (New Jersey: Pearson, 2010).

³ Nanik Hindar Hindaryatiningsih, “Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 100–107.

⁴ Harits Masduqi, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebudayaan Nasional,” *Universitas Negeri Malang: Semarang*, 2011.

⁵ Lawrence Harrison, *Culture Matters, How Values, Shape Human Progress* (USA: Basic Books, 2000).

⁶ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues The Creation of Prosperity* (New York: Free Press Paperback, 1996).

⁷ Boulding, *Building a Global Civic Culture: Education for a an interdependence world*.

⁸ Edgar F. Borgatta dan Mari L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology* (New York: Macmillan Publishing Company, 1992).



menjadi solusi utama dalam menghadapi persaingan global⁹. Hal ini tentu dapat dijadikan refleksi bagi bangsa Indonesia agar selalu melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya.

Sosialisasi pewarisan budaya ini menjadi penting karena dengan adanya sosialisasi maka akan terjadi interaksi di mana seorang individu akan memperoleh nilai, sikap, norma, keyakinan, dan bahasa dari kelompoknya. Dalam pelaksanaannya Lawton & Cowen¹⁰ menyebutkan bahwa tingkatan analisis sosial dalam pewarisan budaya dilakukan melalui dua cara yaitu hierarki dan integratif. Cara hierarki dilakukan dengan cara mewaiskan budaya melalui kepemimpinan kharismatik dalam suatu masyarakat sedangkan cara integratif pewarisan budaya dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam sebuah program yang terencana seperti dalam pendidikan dan pembelajaran.

Salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam upaya pewarisan budaya berkelanjutan adalah dengan cara melakukan manajemen kurikulum dengan memasukkan budaya lokal dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai basis dalam melaksanakan pembelajaran, riset, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya telah banyak riset yang memasukkan budaya sebagai bahan kajian dalam pembelajaran namun semuanya masih bersifat parsial dan individualistik, seperti riset yang dilakukan oleh Yesi dkk¹¹ Atmojo¹², Jauharotun dan Mahfud¹³, dan Winangun¹⁴ yang hasil risetnya masih belum menunjukkan ke arah pewarisan budaya secara berkelanjutan. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai institusi tertinggi dalam pendidikan adalah dengan melakukan manajemen kurikulum berbasis etnosains yang bertujuan agar budaya leluhur yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dan dapat diwarisi oleh generasi selanjutnya.

MANAJEMEN KURIKULUM

Nasbi mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan kurikulum.¹⁵ Makna kooperatif dalam manajemen kurikulum yaitu keikutsertaan disusun secara bersama antara setiap unsur dalam pendidikan. Makna komprehensif

⁹ G20Pedia Administrator, "Indonesia Tawarkan Peran Kebudayaan Sebagai Solusi Global" (Jakarta: Info Publik, 8 September 2022).

¹⁰ Dennis Lawton dan Robert Cowen, *Values Culture and Education: An Overview* (London: Kagan, 2001).

¹¹ Yesi Yuana Oktavia, Muhammad Mahfud, dan Rahmat Rudianto, "Internalisasi Kesenian Reog Ponorogo Dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa Di SDN 2 Sumoroto Kauman Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler," *El-Miaz: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar* 2, no. 2 (2023): 62–68.

¹² S. E. Atmojo, "Profil keterampilan proses sains dan apresiasi siswa terhadap profesi pengrajin tempa dalam pembelajaran ipa berpendekatan etnosains," *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* 1, no. 2 (2012).

¹³ Jauharotun Nafi'ah dan Muhammad Mahfud, "Pengaruh Bermain Hopsotch Modification Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Kelompok A Di Ra Al-Azhar Menganti," *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2022): 66–73.

¹⁴ I. Made Ari Winangun, "Media Berbasis Budaya Lokal dalam Pembelajaran IPA SD," *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2020): 65–72.

¹⁵ Ibrahim Nasbi, "Manajemen kurikulum: Sebuah kajian teoritis," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017).



dalam manajemen kurikulum bahwasannya kurikulum membahas secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Adapun mana sistemik dan sistematis adalah, bahwasannya kurikulum dirancang secara hierarki dan sesuai sistem mulai dari visi, misi dan tujuan suatu lembaga hingga perumusan capaian pembelajaran luaran yang ingin dicapai.¹⁶

Manajemen kurikulum pun juga dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian rencana yang kegiatannya dititikberatkan dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tugas pendidik serta kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar-mengajar¹⁷. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas pendidik seperti tugas mengajar, koordinasi penyusunan persiapan mengajar, membina kegiatan ekstra maupun kokurikuler siswa. Sementara kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar di antaranya adalah penyusunan jadwal, penyelenggaraan evaluasi, membuat laporan hasil evaluasi serta kegiatan pembimbingan dan konseling kepada peserta didik.

Lingkup bahan kajian dari manajemen kurikulum meliputi manajemen perencanaan kurikulum, manajemen pengorganisasian kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, dan manajemen evaluasi kurikulum¹⁸. Manajemen perencanaan kurikulum membutuhkan keahlian *managing* dari persona yang terlibat langsung dalam perencanaan kurikulum. Hamalik menyebutkan bahwa dari sisi pendekatan yang bersifat administratif terdapat dua pendekatan dalam perencanaan kurikulum yaitu *top down* dan *bottom up*. Dalam merencanakan kurikulum pihak manajemen perlu memperhatikan dua kondisi utama. Dua kondisi tersebut yaitu kondisi sosiokultural dan ketersediaan densitas.¹⁹

Olivia menyebutkan bahwa ada empat model perencanaan kurikulum yaitu: model rasional deduktif, model interaktif rasional, model disiplin, dan model tanpa perencanaan.²⁰ Model rasional deduktif atau *rasional tyler* lebih menitikberatkan pada *goals and objectives* tetapi cenderung lebih mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model interaktif rasional lebih menitikberatkan pada rasionalitas, model ini sering disebut sebagai model situasional. Pendekatan disiplin lebih menitikberatkan pada keterlibatan para pendidik, para pendidik sebagai pelaksana kurikulum merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologis, maupun psikologis. Pendekatan tanpa perencanaan lebih mengutamakan intuitif para pendidik dalam ruang kelas sebagai bentuk *desicion maker* sehingga tanpa adanya perumusan tujuan maupun analisis intelektual.

Manajemen organisasi kurikulum adalah kerangka umum program-program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini adalah hal esensial dalam pembinaan kurikulum karena hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Sowell²¹ menyebutkan bahwa konsep organisasi kurikulum empat desain utama yaitu: *Subject Matter Design*, yang terdiri dari *Single Subject Design*, *Correlated Subjects*, *Broad Fields*, *Interdisciplinary Integrated Studies*,

¹⁶ Haudi Haudi, *Manajemen Kurikulum* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021)..

¹⁷ Yuhasnil Yuhasnil, “Manajemen kurikulum dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,” *Journal Of Administration and Educational Management* Vol. 3, no. 2 (2020): 214–21.

¹⁸ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

¹⁹ Rusman Rusman, *Manajemen Kurikulum Seri II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

²⁰ Olivia Peter F., *Development The Curriculum* (New York: Pearson Education, 2004).

²¹ Evelyn J. Sowell, *Curriculum An Integrative Introduction*, III (New York: Pearson Education, Inc., 2012). 92



dan *Thematic Instruction*; *Society-Culture-Based Design* atau *Social function and Activities Designed*; *Learner-based-designed* yang terdiri atas *organic Curriculum* dan *Development Curriculum*; dan *other design* seperti *Technology as Curriculum*, *School-to-Work Curricul*, dan *Core Curriculum*. Selain itu Rusman juga menyebutkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum di antaranya: *scope* (ruang lingkup), *squnce* (bahan), kontinuitas, keseimbangan dan keterpaduan.

Manajemen pelaksanaan kurikulum adalah proses realisasi konsep-konsep kurikulum yang telah disusun yang direalisasikan dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah disusun.²² Menurut Sowell, pokok-pokok kegiatan pelaksanaan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi sembilan kegiatan yaitu: kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, tugas guru, tugas murid, proses belajar mengajar, ekstrakurikuler, pelaksanaan evaluasi, pengaturan alat dan bahan, bimbingan dan penyuluhan, dan kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru.²³ Manajemen pelaksanaan kurikulum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pelaksanaan tingkat sekolah dan tingkat kelas. Manajemen pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah sedangkan manajemen pelaksanaan kurikulum tingkat kelas yang bertanggung jawab adalah pendidik oleh karena itu perlu pengaturan secara administratif agar pelaksanaan kurikulum berjalan lancar.²⁴

Manajemen evaluasi kurikulum hakikatnya adalah kegiatan yang bersifat komprehensif karena kegiatan evaluasi dan kurikulum memiliki karakteristik yang tak terpisahkan. Tyler sebagaimana dikutip oleh Rusman menyebutkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi peserta didik, pendidik, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan dan tingkat ketepatan keputusan serta efektivitas program. Ada beberapa masalah yang biasa dihadapi dalam evaluasi kurikulum sebagaimana pendapat Norman dan Schmidt²⁵ yaitu: kesulitan dalam pengukuran, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan *double blind*, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, dan adanya pengaruh intervensi dalam pendidikan yang sangat mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah.

ETNOSAINS

Etnosains adalah pemeriksaan terhadap persepsi, pengetahuan, dan klasifikasi dunia sebagaimana tercermin dalam penggunaan bahasa, yang dapat membantu para antropolog memahami budaya tertentu. Dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk mempelajari suatu budaya dan mempelajari leksikon dan sintaksisnya, mereka dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dalam memahami bagaimana suatu budaya tertentu mengklasifikasikan dunia material dan sosialnya. Selain itu, pendekatan yang

²² dikembangkan Nasbi, "Manajemen kurikulum."

²³ Sowell, *Curriculum An Integrative Introduction*. 67

²⁴ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet. IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

²⁵ H.G. Norman dan G.R. Schmidt, *Effectiveness of Problem Based Learning Curricula: Theory, Practice, and Paper Darts* (New York: Medical Education, 2000).



diadopsi ini secara bersamaan memberikan suatu titik di mana disiplin linguistik, atau setidaknya beberapa sikap umumnya, dapat digunakan secara bijaksana dalam antropologi dan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan tidak hanya tentang hakikat manusia tetapi juga tentang hakikat manusia dan sifat budaya.²⁶

Etnosains dapat digunakan untuk menganalisis terminologi kekerabatan suatu budaya tertentu, menggunakan bahasa mereka dan menurut cara mereka memandang anggota masyarakatnya. Taksonomi "adalah model analisis yang tujuannya adalah deskripsi jenis hubungan hierarki tertentu antara anggota sekumpulan elemen tertentu"²⁷. Misalnya, dalam masyarakat kita, kita mengklasifikasikan kelompok keluarga dengan memberi gelar pada anggotanya sebagai ayah, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, saudara laki-laki, anak laki-laki, kakek, nenek, dan sebagainya.

Etnosains berkaitan dengan bagaimana budaya tertentu mengklasifikasikan prinsip-prinsip tertentu selain bagaimana hal itu diungkapkan melalui bahasa mereka. Dengan memahami budaya tertentu melalui cara mereka memandang dunia, para antropolog berupaya menghilangkan bias apa pun melalui penerjemahan serta mengkategorikan prinsip-prinsip mereka dengan cara mereka sendiri. "Metode baru, yang berfokus pada penemuan dan deskripsi sistem rakyat, kemudian dikenal sebagai Etnosains. Analisis etnosains sejauh ini terkonsentrasi pada sistem klasifikasi dalam domain budaya dan bahasa seperti warna, tumbuhan, dan obat-obatan"²⁸ Pendekatan etnosaintifik dapat digunakan untuk lebih memahami suatu budaya tertentu dan pengetahuan mereka tentang budaya mereka. Menggunakan pendekatan etnografi dapat membantu para antropolog memahami bagaimana budaya tertentu memandang dan mengkategorikan makanan, hewan, obat-obatan, serta tumbuhan mereka sendiri.

Etnosains dapat secara efektif diringkas sebagai suatu sistem klasifikasi untuk suatu budaya tertentu dengan cara yang sama seperti seorang ahli botani menggunakan sistem taksonomi untuk mengklasifikasikan spesies tumbuhan. Segala sesuatu mulai dari tingkat kelas, konsumsi makanan, pakaian, dan objek budaya material akan tunduk pada sistem klasifikasi taksonomi. Pada hakikatnya, etnosains merupakan cara mengklasifikasikan sistem budaya dalam tatanan yang terstruktur untuk lebih memahami budaya. Akar etnosains dapat ditelusuri kembali ke antropolog berpengaruh seperti Franz Boas, Bronislaw Malinowski, dan Benjamin Whorf yang berupaya memahami budaya lain dari sudut pandang orang dalam. Ward Goodenough diakreditasi karena membawa etnosains ke tahap ketika ia mendefinisikan sistem pengetahuan budaya dengan menyatakan: "Budaya masyarakat terdiri dari apa pun yang harus diketahui atau diyakini seseorang agar dapat beroperasi dengan cara yang dapat diterima oleh anggotanya. Kebudayaan bukanlah fenomena material; itu tidak terdiri dari benda, perilaku, atau emosi. Ini lebih merupakan sebuah organisasi dari hal-hal ini. Ini adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pikiran orang, model mereka dalam memahami, menghubungkan, dan menafsirkannya."

²⁶ R. Videbeck dan Pia J., "Plans for Coping: An Approach to Ethnoscience. Syracuse University," *Anthropological Linguistics* 8, no. 8 (1996): 71–77..

²⁷ Norma Perchonock dan Oswald Werner, "Navaho Systems of Classifications: Some Implications for Ethnoscience," *Ethnology* 8, no. 3 (1969): 229–42, <https://doi.org/doi:10.2307/3772753>.

²⁸ Norma Perchonock dan Oswald Werner, "Navaho Systems of Classifications: Some Implications for Ethnoscience," *Ethnology* 8, no. 3 (1969): 229–42, <https://doi.org/doi:10.2307/3772753>..

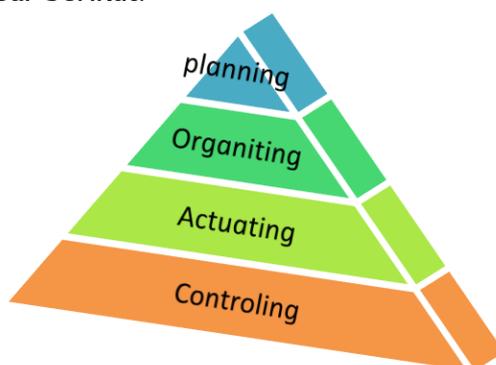


Untuk menempatkan etnosains dengan tepat dalam konteksnya, pertama-tama kita harus memahami definisi etnosains. hal ini didefinisikan sebagai "usaha mendeskripsikan budaya dari sudut pandang yang benar-benar emik (perspektif dalam etnografi yang menggunakan konsep dan kategori yang relevan dan bermakna terhadap budaya yaitu analisis orang dalam), yang menghilangkan semua kategori yang dimiliki oleh etnografer itu sendiri"²⁹. Etnosains juga merupakan suatu cara untuk mempelajari dan memahami bagaimana seorang individu atau kelompok memandang lingkungannya dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang tercermin dalam perkataan dan tindakan mereka sendiri.

PEWARISAN BUDAYA BERKELANJUTAN MELALUI MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS ETNOSAINS

Manajemen kurikulum berbasis etnosains mencakup pengembangan dan penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan pengetahuan etnologi dan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghormati dan mempertimbangkan berbagai aspek budaya, nilai, dan pengetahuan lokal dalam pengajaran. Prosesnya melibatkan kolaborasi dengan komunitas yang terlibat dan mengedepankan perspektif lintas budaya dalam pendidikan. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam memanaj sebuah kurikulum yang berbasis etnosains dalam upaya pewarisan budaya secara berkelanjutan diperlukan manajemen kurikulum yang andal.

Manajemen kurikulum berbasis etnosains melibatkan serangkaian langkah dan proses. Adapun langkah-langkah umum dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains seperti terlihat pada gambar berikut.



.Gambar 1 Program Manajemen Kurikulum

Tahap *planning* dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains meliputi langkah-langkah yang sangat rinci yaitu: 1) Pemahaman mendalam tentang etnosains dan budaya lokal, 2) analisis kebutuhan dan tujuan pendidikan, 3) konsultasi dan keterlibatan komunitas, 4) identifikasi mata pelajaran/mata kuliah dan konten etnosains, 5) pengembangan kurikulum dengan cara merancang struktur kurikulum dan penentuan metode pembelajaran, 6) penyusunan materi pembelajaran yang terintegrasi dengan pengetahuan budaya local, 7) pelatihan guru dan kesiapan implementasi, 8) pengembangan materi suplemen dan sumber belajar, 9) perencanaan kegiatan

²⁹ Marc Augé, *The war of dreams: exercises in ethno-fiction* (London: Pluto Press, 1999)

ekstrakurikuler dan kunjungan lapangan, 10) perencanaan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dan 11) konsolidasi umpan balik dan penyempurnaan kurikulum. Semua Langkah tersebut akan semakin mantap apabila terdapat kesinambungan, keterlibatan aktif komunitas, dan fleksibilitas dalam merencanakan manajemen kurikulum.³⁰

Tahap *organizing* manajemen kurikulum berbasis etnosains melibatkan struktur dan tata Kelola yang baik untuk memastikan implementasi dan efektivitas kurikulum.³¹ Oleh karena itu dalam proses pengorganisasian kurikulum diperlukan Langkah-langkah berikut: 1) membentuk tim khusus pengembang kurikulum yang terdiri dari pendidik, ahli etnosains, budayawan, dan anggota komunitas lokal, 2) menunjukan koordinator kurikulum yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum, 3) penentuan struktur kurikulum yang meliputi rincian mata pelajaran, pembagian kurikulum persemester, dan alokasi waktu setiap topik, 4) melakukan koordinasi antar mata pelajaran agar integrasi budaya dalam setiap aspek pembelajaran terjamin dengan pasti, 5) melakukan pengelompokan konten etnosains ke dalam modul atau unit pembelajaran yang koheren dan terintegrasi, 6) penyusunan materi pembelajaran yang mencakup teks, aktivitas, sumber belajar, dan materi tambahan yang mendukung konsep etnosains dan budaya lokal, 7) penetapan metode pengajaran dan evaluasi seperti pembelajaran berbasis proyek, penelitian lapangan, atau simulasi yang memungkinkan integrasi budaya, 8) menyelenggarakan pelatihan guru untuk memastikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum berbasis etnosains, serta mengembangkan sumber daya manusia yang memadai termasuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami pendekatan dalam implementasi kurikulum ini, 9) merencanakan dan mengatur kegiatan ekstrakurikuler kunjungan lapangan, atau kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperdalam pemahaman peserta didik tentang budaya, 10) penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan serta melakukan peninjauan dan perbaikan secara kontinu berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan kurikulum sesuai dengan tujuan Pendidikan, 11) menjalin hubungan yang kuat dengan komunitas dan pihak-pihak terkait untuk memastikan keterlibatan dan dukungan terhadap kurikulum etnosains serta menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan tentang kurikulum, perubahan, dan kemajuan kepada semua pihak terkait.

Tahap *actuating* dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains secara efektif membutuhkan koordinasi, pemantauan, dan interaksi yang aktif dengan semua pihak terkait termasuk pendidik, peserta didik, dan komunitas lokal³² Oleh karena itu diperlukan beberapa Langkah yang pasti dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis etnosains yaitu: 1) memastikan materi dan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal dan ilmu pengetahuan dan memperhatikan metode pengajaran yang cocok, 2) mengkoordinasikan dengan para pendidik untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kurikulum berbasis etnosains dengan cara memberikan bimbingan dan dukungan, 3) mendorong diskusi antarpendidik dan peserta didik untuk memperdalam pemahaman tentang budaya lokal dan ilmu pengetahuan dengan cara mengatur forum atau pertemuan

³⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet. IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

³¹ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

³² Parmin Parmin, “Potensi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPA di SMP,” *Prosiding KPSDA 1*, no. 1 (2015).



regular untuk berbagai pengalaman dan ide, 4) memanfaatkan teknologi Pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis etnosains dengan memastikan akses dan pelatihan yang memadai untuk pendidik dan peserta didik, 5) mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan budaya lokal dan memberikan dukungan sumber daya untuk kegiatan tersebut, 6) memantau dan menilai sejauh mana kurikulum berbasis etnosains diimplementasikan sesuai rencana serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan, 7) melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap konsep etnosains dan budaya lokal dengan menggunakan berbagai jenis evaluasi yang relevan, 8) memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pendidik dan peserta didik berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran dengan cara memberikan pengakuan atas pencapaian yang telah diraih dalam memahami dan menghargai budaya lokal, 9) mengukur efektivitas kurikulum berdasarkan hasil belajar dan respon peserta didik untuk memastikan apakah tujuan dan sasaran kurikulum telah tercapai, 10) melakukan koreksi dan penyesuaian kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik serta mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan untuk peningkatan berkelanjutan.

Tahap *controlling* manajemen kurikulum berbasis etnosains agar berjalan secara efektif harus melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan Pendidikan dan integrasi budaya tercapai sesuai rencana. kontrol yang efektif dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains akan membantu memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan tujuan Pendidikan mencapai integrasi budaya yang signifikan, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik.³³ Berikut Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap *controlling*: 1) menentukan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan Pendidikan dan integrasi budaya dan melakukan pemantauan teratur terhadap pelaksanaan kurikulum dan perolehan hasil belajar peserta didik, 2) melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik baik secara formatif maupun sumatif untuk mengidentifikasi pencapaian dan area perbaikan serta memastikan apakah peserta didik telah dapat memahami konsep etnosains dan budaya lokal dengan baik, 3) meminta *feedback* dari pendidik dan peserta didik tentang pengalaman pembelajaran dan kendala yang dihadapi dan menggunakan hasil *feedback* tersebut untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kurikulum, 4) lakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik dan wali peserta didik terhadap implementasi kurikulum etnosains dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 5) menganalisis data hasil evaluasi, tes atau proyek siswa untuk mendapatkan gambaran yang mendalam terkait pencapaian dan kinerja kurikulum dengan cara mengidentifikasi tren, pola, dan area yang membutuhkan perhatian khusus, 6) membandingkan hasil dan pencapaian peserta didik dengan standar akademik, 7) menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, dan 8) menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kurikulum berbasis etnosains.

Kurikulum berbasis etnosains sebagaimana kurikulum-kurikulum lainnya juga memiliki komponen utama yang membentuknya. Komponen-komponen tersebut yaitu: pengetahuan lokal, etnografi, keterlibatan komunitas, interdisipliner, pendekatan

³³ Haudi Haudi, *Manajemen Kurikulum* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021).



kontekstual, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi budaya, keanekaragaman, dan evaluasi alternatif. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pengetahuan lokal baik yang berupa praktik, tradisi lokal dari komunitas tertentu dalam kurikulum berbasis etnosains diintegrasikan untuk membantu mempertahankan warisan budaya dan menghormati kearifan lokal. Pembelajarannya pun harus melibatkan komunitas hal tersebut dilakukan agar kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan mencerminkan nilai dan kebutuhan komunitas. Selain itu dalam kurikulum berbasis etnosains juga diajarkan keterampilan etnografi dan penelitian lapangan untuk lebih dalam mengetahui kehidupan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu dalam pembelajaran dilakukan pendekatan secara interdisipliner dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, ilmu sosial, ilmu alam, dan humaniora untuk menggambarkan hubungan yang kompleks antara manusia, lingkungan, dan budaya.

Proses pembelajaran dalam kurikulum berbasis etnosains menggunakan pendekatan kontekstual dengan cara menyajikan konten pembelajaran dalam konteks yang relevan bagi peserta didik berdasarkan realitas budaya dan social mereka. Selain itu bentuk pembelajarannya pun berupa pembelajaran aktif yang mana peserta didik secara aktif dan kolaboratif melakukan aktivitas belajar. Adapun bentuk strategi yang yang bisa digunakan para pendidik yaitu dengan bentuk diskusi kelompok, *project based learning* (PjBL), *problem based learning* (PBL), *discovery learning*, *inkuri learning*, dan presentasi untuk membangun pemahaman yang mendalam. Selain itu pendidik dalam melakukan pembelajaran juga dapat melakukan refleksi budaya untuk membangun nalar kritis peserta didik tentang peran budaya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya pada masyarakat.

Dalam mengevaluasi hasil pembelajaran pendidik dapat melakukan berbagai teknik evaluasi alternatif yang tidak hanya mengukur pemahaman akademis tetapi juga pengetahuan budaya dan kemampuan beradaptasi dalam konteks masyarakat. Berikut bentuk-bentuk evaluasi yang dapat digunakan dalam kurikulum berbasis etnosains.

- a. Pemahaman Budaya, evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang budaya, nilai-nilai, dan tradisi lokal yang telah diajarkan dalam kurikulum. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui presentasi hasil observasi dan wawancara, esai, atau proyek berbasis penelitian.
- b. Pengetahuan Ilmiah, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep ilmiah yang diajarkan dalam konteks etnografi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui ujian tulis atau lisan, serta proyek penelitian.
- c. Keterampilan Etnografi, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam melakukan penelitian etnografi. Oleh karena itu melalui proyek penelitian lapangan, peserta didik dapat dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam mengamati, mewawancarai, dan menganalisis informasi tentang komunitas lokal terkait budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tersebut.
- d. Kolaborasi dan Partisipasi, Teknik evaluasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dalam kelas, seperti diskusi kelompok atau proyek tim.



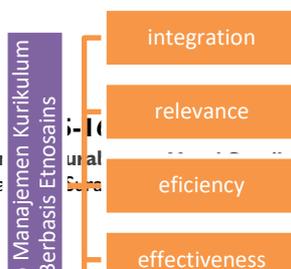
- e. Pemecahan Masalah Kontekstual, evaluasi ini disajikan dalam bentuk situasi atau maalah yang relevan dengan budaya lokal untuk dipecahkan oleh peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep ilmiah dalam konteks nyata.
- f. Kreativitas dan Inovasi, evaluasi ini dilakukan untuk mendorong siswa agar mampu mengembangkan solusi atau proyek kreatif yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan elemen budaya. Evaluasi bentuk ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pameran budaya dan pembuatan kreasi alternatif nilai-nilai budaya.
- g. Refleksi dan Kesadaran Budaya, evaluasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam merenungkan dampak dan implikasi budaya bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik ini dapat dilakukan dalam bentuk karya wisata ke situs-situs budaya dan menonton berbagai pagelaran budaya yang kemudian para peserta didik diinstruksikan untuk melakukan refleksi hasil kegiatan tersebut.
- h. Penilaian Formatif, sebagaimana penilaian pada umumnya, penilain formatif bertujuan untuk menerapkan umpan balik berkesinambungan selama proses pembelajaran, dan memebrrikan peserta didik peluang untuk memperbaiki pemahaman mereka terkait budaya dan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan.
- i. Penialian Otonom, jeni evaluasi ini bertujuan untuk mendorong siswa mengambil peran aktif dalam mengevaluasi pemahaman mereka sendiri terhadap materi pembelajaran dan kemajuan mereka dalam keterampilan etnografi. Jenis evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penialian diri atau *self assessment* dengan cara menentuka tingkat kemampuan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik secara mandiri.
- j. Evaluasi Komunitas, sesuai dengan Namanya, maka evaluasi ini melibatkan komunitas lokal dalam mengevaluasi dampak dari kurikulum berbasis etnosains terhadap peserta didik dan komunitas itu sendiri. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan survei kepada komunitas budaya lokal yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan tujuan kurikulum dan sebagai bahan rujukan dalam melakukan evaluais kurikulum.

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Dalam hal ini banyak para ahli yang memberikan prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Rusman menyebutkan ada delapan prinsip yaitu, prinsip koherensi, prinsip efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip relevansi, prinsip integrasi, prinsip keseimbangan, prinsip keterjangkauan, dan prinsip keterukuran.³⁴ Selanjutnya Hamalik³⁵ juga menyebutkan terdapat tujuh prinsip dalam manajemen kurikulum yaitu: *integrity, integration, relevance, effectiveness, efficiency, quity, dan sistanibility pricile* Lebih lanjut Sukmadinata sebagaimana yang dikutip oleh Haudi³⁶ juga menyebutkan terdapat lima prinsip dalam manajemen kurikulum yaitu, *integration principle, relevance principle, efficiency principle, effectiveness principle, dan flecibility principle* Dalam hal ini penulis lebih

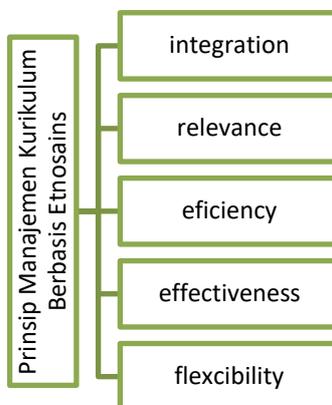
³⁴ Rusman Rusman, *Manajemen Kurikulum Seri II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

³⁵ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum..*

³⁶ Haudi, *Manajemen Kurikulum..*



cenderung kepada pendapat Sukmadinata dalam memberlakukan prinsip-prinsip manajmen kurikulum. Sebagaimana gambar berikut



Gambar 2 Prinsip Manajemen Kurikulum

Prinsip *integration* atau keterpaduan dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains mengacu pada pendekatan yang memastikan seluruh komponen dan aspek dari kurikulum saling terhubung, berintegrasi, dan memiliki koherensi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik, relevan, dan efektif bagi peserta didik. Prinsip keterpaduan meliputi integrasi mata pelajaran, konsistensi tujuan pembelajaran, kohesi metode pengajaran, relevansi konteks sosial dan kultural, sinkronisasi penilaian, keterkaitan antara program dan kelas, adaptabilitas terhadap perubahan, komunikasi dan konsultasi secara efektif. Dengan menerapkan prinsip keterpaduan dalam manajemen kurikulum diharapkan kurikulum dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menyeluruh, dan terintegrasi bagi peserta didik, sejalan dengan tujuan pendidikan dan perkembangan peserta didik dan pengalamannya dalam memahami budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya baik dalam lingkup komunitas budaya tertentu maupun secara luas.

Prinsip relevansi dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains menekankan pentingnya memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan konteks peserta didik dan masyarakat serta komunitas lokal. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan pendidikan dan memenuhi tuntutan dunia nyata dan sebagai sarana pewarisan budaya secara berkelanjutan. Prinsip relevansi mengharuskan bagi sebuah kurikulum agar relevan dengan kebutuhan peserta didik, dunia nyata, kebutuhan pasar, perkembangan ilmiah dan teknologi, aspirasi sosial dan kemasyarakatan, pengembangan karakter dan moral, tujuan pendidikan nasional, dan relevan dengan hasil belajar. Dengan memperhatikan prinsip relevansi ini, maka kurikulum diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang lebih bermakna, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dan komunitas lokal serta memberikan kontribusi yang berarti untuk perkembangan individu dan kemajuan sosial khususnya dalam upaya pewarisan budaya secara berkelanjutan.

Prinsip efisiensi dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains mengacu pada upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia (waktu, tenaga, dana, dan fasilitas) untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan biaya yang efektif. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran. Bentuk konkret prinsip ini dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains yaitu dengan menyusun rencana dan perencanaan yang tepat, penggunaan sumber daya yang bijak, optimalisasi proses pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan waktu secara efektif, penilaian secara efisien, melakukan kolaborasi dan kerja tim, melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan, serta melakukan inovasi dan pembaharuan sesuai dengan hasil komunikasi dengan komunitas lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menerapkan prinsip efisiensi maka diharapkan kurikulum mampu meminimalisasi penggunaan sumber daya namun tetap menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bahkan melampauinya.

Prinsip efektivitas dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara optimal. Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Prinsip efektivitas dalam kurikulum mengharuskan kurikulum memiliki acuan dalam ketercapaian tujuan pendidikan dengan menyusun tujuan yang jelas dan realistis, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, penggunaan metode penilaian yang relevan, melakukan pembelajaran yang fleksibel dan berdiferensiasi, menggunakan konteks dan aplikasi dunia nyata dalam pembelajaran serta melibatkan pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan. Dengan menerapkan prinsip efektivitas ini, maka Kurikulum diharapkan mampu memberikan hasil pembelajaran yang maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan serta sesuai dengan tujuan utama pewarisan budaya secara berkelanjutan.

Prinsip fleksibilitas dalam manajemen kurikulum berbasis etnosains menekankan pentingnya memiliki kurikulum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan dinamis dalam konteks pendidikan. Fleksibilitas memungkinkan kurikulum untuk tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan baru, tuntutan masyarakat, dan perubahan lingkungan pendidikan. Prinsip fleksibilitas dalam manajemen kurikulum mendukung pendidikan yang adaptif, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmiah serta teknologi. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan potensi unik mereka.

KESIMPULAN

Pewarisan budaya secara berkelanjutan melalui manajemen kurikulum berbasis etnosains dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam proses, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan dengan baik dan dengan tahapan yang prosedural dan berdasarkan prinsip manajemen pada umumnya. Pada tahap perencanaan harus memperhatikan keadaan sosiokultural dan ketersediaan dan keserbakecukupan densitas.



Pada tahap pengorganisasian harus memperhatikan *scope, sequence, balance, integrated*. Pada tahap pelaksanaan harus dapat dilaksanakan pada tiap level baik satuan pendidikan maupun tingkat kelas. Pada tahap evaluasi harus memperhatikan berbagai bentuk evaluasi seperti tes, survey kepuasan, dan perbandingan hasil pada tiap-tiap jenjangnya.

Kurikulum berbasis etnosains sebagaimana kurikulum-kurikulum lainnya juga memiliki komponen utama yang membentuknya. Komponen-komponen tersebut yaitu: pengetahuan lokal, etnografi, keterlibatan komunitas, interdisipliner, pendekatan kontekstual, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi budaya, keanekaragaman, dan evaluasi alternatif. Sebagaimana kurikulum pada umumnya maka manajemen kurikulum berbasis etnosains harus memperhatikan lima prinsip utama yaitu prinsip *integration, relevance, efficiency, effectiveness, dan flexibility*.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, G20Pedia. “Indonesia Tawarkan Peran Kebudayaan Sebagai Solusi Global.” Jakarta: Info Publik, 8 September 2022.
- Atmojo, S. E. “Profil keterampilan proses sains dan apresiasi siswa terhadap profesi pengrajin tenple dalam pembelajaran ipa berpendekatan etnosains.” *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* 1, no. 2 (2012).
- Borgatta, Edgar F., dan Mari L. Borgatta. *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Publishing Company, 1992.
- Boulding, E. *Building a Global Civic Culture: Education for a an interdependence world*. Syracuse University Press, 1990.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues The Creation of Prosperity*. New York: Free Press Paperback, 1996.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Cet. IV. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Harrison, Lawrence. *Culture Matters, How Values, Shape Human Progress*. USA: Basic Books, 2000.
- Haudi, Haudi. *Manajemen Kurikulum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Hindaryatiningsih, Nanik Hindar. “Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 100–107.
- Lawton, Dennis, dan Robert Cowen. *Values Culture and Education: An Overview*. London: Kagan, 2001.
- Masduqi, Harits. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebudayaan Nasional.” *Universitas Negeri Malang: Semarang*, 2011.
- Nafi’ah, Jauharotun, dan Muhammad Mahfud. “Pengaruh Bermain Hopschotch Modification Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Kelompok A Di Ra Al-Azhar Menganti.” *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2022): 66–73.
- Nasbi, Ibrahim. “Manajemen kurikulum: Sebuah kajian teoritis.” *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017).
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.



- Norman, H.G., dan G.R. Schdmidt. *Effectivenes of Problem Based Learning Curricula: Theory, Practice, and Paper Darts*. New York: Medical Education, 2000.
- Oktavia, Yesi Yuana, Muhammad Mahfud, dan Rahmat Rudianto. "Internalisasi Kesenian Reog Ponorogo Dalam Menumbuhkan Karakter Disiplin Siswa Di SDN 2 Sumoroto Kauman Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler." *El-Miaz: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar 2*, no. 2 (2023): 62–68.
- Parmin, Parmin. "Potensi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPA di SMP." *Prosiding KPSDA 1*, no. 1 (2015).
- Perchonock, Norma, dan Oswald Werner. "Navaho Systems of Classifications: Some Implications for Ethnoscience". *Ethnology* 8, no. 3 (1969): 229–42. <https://doi.org/doi:10.2307/3772753>.
- Peter F., Olivia. *Development The Curriculum*. New York: Pearson Education, 2004.
- Rusman, Rusman. *Manajemen Kurikulum Seri II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sowell, Evelyn J. *Curriculum An Integrative Introduction*. III. New York: Pearson Education, Inc., 2012.
- Videbeck, R., dan Pia J. "Plans for Coping: An Approach to Ethnoscience. Syracuse University." *Anthropological Linguistics* 8, no. 8 (1996): 71–77.
- Winangun, I. Made Ari. "Media Berbasis Budaya Lokal dalam Pembelajaran IPA SD." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar 1*, no. 1 (2020): 65–72.
- Yuhasnil, Yuhasnil. "Manajemen kurikulum dalam upaya peningkatan mutu pendidikan." *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 3, no. 2 (2020): 214–21.
- Yuki, Gary. *Leadership in Organization*. New Jersey: Pearson, 2010.

